

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Selain ancaman tradisional kawasan, ASEAN juga menghadapi ancaman nontradisional yang salah satunya adalah terorisme. Melihat aktivitas perkembangan muslim yang pesat di wilayah Filipina bagian Selatan, tempat tersebut menjadi tempat yang subur untuk berkembangnya ‘kekhalfaan jauh’ *Islamic State of Iraq and Syria* (ISIS) sebagai basis gerakan melawan pan-islamisme di Asia Tenggara.¹ Di samping itu, setelah Al-Qaeda sukses melancarkan agenda terornya pada peristiwa 9/11, mereka menetapkan agenda baru untuk memperluas jaringannya ke Asia Tenggara.²

Beberapa anggota dari dua jaringan terorisme terbesar di dunia tersebut terbang ke Asia Tenggara untuk membangun jaringan lokal, merekrut dan bekerja sama dengan kelompok militan pribumi seperti Jemaah Islamiyah (JI), Front Pembebasan Islam Moro (MILF), Abu Sayyaf Group (ASG) dan *Islamic State Lanao* (ISL).³ Asia Tenggara memiliki jumlah penduduk muslim yang menjadi mayoritas di kawasan tersebut. Fakta lainnya, negara-negara anggota dalam kawasan memiliki hubungan yang dekat dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat (AS) sehingga tampak begitu menarik bagi Al-Qaeda dan ISIS

¹ Poltak Partogi Nainggolan, “Kekhalifahan ISIS di Asia Tenggara, Sekadar Wacana atau Realitas?”, dalam *POLITICA*, 2017, doi:<http://dx.doi.org/10.22212/jp.v8i2.1143>.

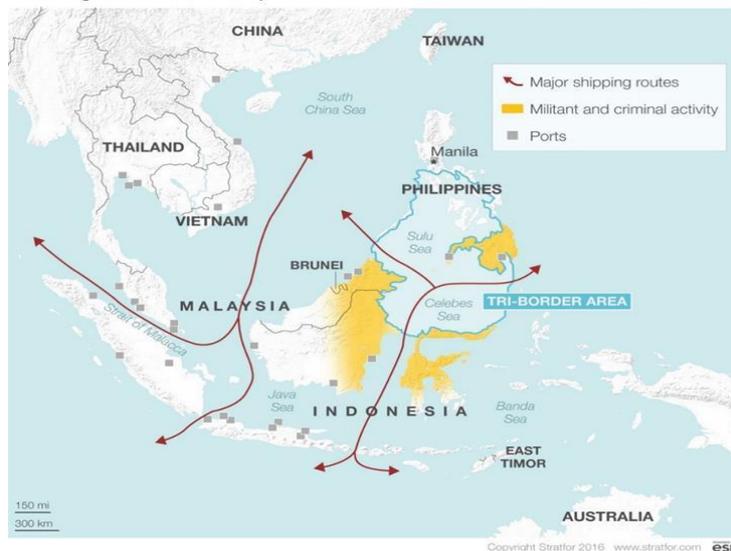
² Faruq Arjuna Hendroy, “ASEAN Political Security Community (APSC) on Counter-terrorism: Roles and Obstacles”, dalam *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional Vol. 14 No. 2 (2018)*, *Centre for the Middle East and Global Peace Studies UIN Jakarta*. doi:<https://doi.org/10.26593/jihi.v14i2.2982.163-174>.

³ *Ibid.*

untuk memperluas jaringannya disana. Dengan narasi pelindung bagi kaum minoritas tertindas, mereka menyusup untuk melancarkan serangan atas nama solidaritas muslim.⁴ Hal ini kemudian yang membuat Pemerintahan Bush menyebut ASEAN sebagai front kedua dalam melawan terorisme global.⁵

ASEAN kemudian membuat Deklarasi ASEAN tentang Aksi Bersama Melawan Terorisme pada tahun 2001 untuk memetakan langkah-langkah penanganan terorisme di kawasan. Pada November 2002, ASEAN mengeluarkan Dokumen tentang Pemberantasan Kejahatan Transnasional termasuk terorisme, pembajakan laut dan penangkapan ikan secara ilegal, penyelundupan senjata, serta perdagangan manusia dan obat-obatan terlarang. Pada tahun 2002 terjadi peristiwa Bom Bali I yang menewaskan 200 turis Australia dan penduduk setempat. Sejak peristiwa Bom Bali I, jumlah aktivitas teror di Asia Tenggara semakin meningkat.⁶

Gambar 1.1 Area Tri-Border Asia Tenggara yang rawan ancaman non-tradisional



⁴ *Ibid.*

⁵ Pablo Pareja Alcaraz, "CASUALTIES ON OF THE WAR ON TERROR? HUMAN RIGHTS IN SOUTHEAST ASIA BEFORE AND AFTER 9/11", CIDOB (Oktober 2003), diakses dari <http://www.cidob.org> (diakses pada 21 Mei 2022).

⁶ Global Terrorism Database, *GTD Access*, 2021, dalam <https://www.start.umd.edu/gtd/access/> (diakses pada 21 Mei 2022).

Sumber: (worldview.stratfor.com, 2016)⁷

Faktanya, tidak semua negara di Asia Tenggara disusupi oleh Al-Qaeda, ISIS dan jaringan-jaringannya. Mereka lebih aktif di wilayah tri-border Asia Tenggara yang melibatkan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Filipina, tepatnya di perbatasan Laut Sulu antara Filipina dengan Sabah, Malaysia, serta perbatasan perairan Laut Sulawesi yang menghubungkan Mindanao dengan Sulawesi, Indonesia.

Mereka paling banyak aktif di Filipina dengan visi utama melawan kepentingan AS dengan mengatur wilayah-wilayah di Filipina sebagai basis pembangunan kamp paramiliter.⁸ Al-Qaeda juga banyak menempatkan JI di Indonesia sebagai eksekutor dengan mendanainya sambil menargetkan negara tetangga yakni Malaysia, Singapura dan Thailand untuk serangan-serangan berikutnya.⁹ Malaysia digunakan oleh para militan sebagai titik pertemuan atau transit dalam perencanaan serangan skala besar.¹⁰

Di Filipina, kasus terorisme meningkat signifikan dalam rentang tahun 2011 hingga 2013. 89 kasus terjadi di tahun 2011, lalu meningkat drastis menjadi 652 kasus di tahun 2013.¹¹ Hal tersebut membuat Filipina menjadi negara yang paling rentan terhadap serangan teroris dibanding negara anggota ASEAN lainnya.¹²

⁷ worldview.stratfor.com, “*Policing Southeast Asia's Tri-Border Area*”, 2016, diakses dari <https://worldview.stratfor.com/article/policing-southeast-asias-tri-border-area> (pada 5 Maret 2022).

⁸ Faruq Arjuna Hendroy, loc.cit.

⁹ *Ibid.*, hlm. 4

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*, hlm.7

¹² *Ibid.*

Peristiwa terorisme terbesar yang terjadi di Filipina dan termasuk yang terbesar di Asia Tenggara adalah Pertempuran Marawi. Pertempuran Marawi sendiri adalah aksi militan yang dilakukan oleh kelompok teroris Abu Sayyaf (ASG) dan Klan Maute di Marawi, Ibukota Provinsi Lanao del Sur, Pulau Mindanao Selatan, Filipina.¹³

Pertempuran melibatkan jaringan teroris Al-Qaeda dan ISIS yang berafiliasi dengan jaringan domestik MILF, ASG dan ISL melawan tentara militer dan pasukan kepolisian Filipina (PNP).¹⁴ Pengepungan kota terjadi selama lima bulan sejak 23 Mei 2017 hingga 23 Oktober 2017. Pertempuran dengan cepat menyebar ke seluruh penjuru kota dengan kehadiran kelompok-kelompok militan yang mengambil alih lokasi-lokasi strategis termasuk bangunan pemerintah.¹⁵

ISL dipimpin oleh Maute bersaudara yakni Omar Khayyam dan Abdullah, sedangkan Abu Sayyaf Group dipimpin oleh Isnilon Hapilon yang dideklarasikan sebagai pemimpin *Islamic State Philippines* (ISP) oleh pemimpin ISIS Abu Bakar Al-Baghdadi.¹⁶ Penyerangan di Marawi dilakukan oleh sekitar 300 militan IS yang terdiri dari militan ISL, ASG, pejuang dari Indonesia dan Malaysia, serta kelompok Balik Islam, yaitu kelompok warga yang mengkonversi agama menjadi Islam.¹⁷

¹³ Brenda D'Angela Candra Wijaya, 2019, "Sekuritisasi Isu Terorisme ASEAN Pasca Pertempuran Marawi", dari <https://repository.unair.ac.id> > ...

sekuritisasi isu terorisme asean pasca pertempuran marawi. (diakses pada 21 Mei 2022)

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ United Nations High Commissioner for Refugees, "*Philippines: IDP protection assessment report - Armed Confrontations and Displacement in Marawi (AFP vs Maute)*", reliefweb.int, 2017, diakses dari reliefweb: <https://reliefweb.int/report/philippines/philippines-idp-protection-assessment-report-armed-confrontations-and-0> (pada 22 Mei 2022).

¹⁶ Carmela Fonbuena, "*Terror in Mindanao: The Mautes of Marawi*", www.rappler.com, 2017, diakses dari <https://www.rappler.com/newsbreak/in-depth/173697-terrorism-Mindanao-maute-family-marawi-city> (pada 7 Maret 2022).

¹⁷ Rohan Gunaratna, "The Siege of Marawi: A Game Changer in Terrorism in Asia", *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 2017, 9(7).

Tercatat lebih dari 47 warga sipil dan 970 militan teroris tewas pada Oktober 2017. Konflik antara Angkatan Bersenjata Filipina (AFP) dan koalisi militan Negara Islam (IS) mengakibatkan kehancuran kota akibat baku tembak, pengeboman dan serangan udara.¹⁸ The Economist mencatat bahwa pada akhir pengepungan terdapat 1,1 juta warga sipil mengungsi karena konflik ini.¹⁹ Akibat serangan ISIS dan afiliasinya, tercatat lebih dari 1.000 kematian dan 400.000 warga sipil Marawi mengungsi. Data lain dari Kantor Manajemen dan Pengurangan Bencana Nasional mencatat terdapat 5.055 keluarga tinggal di 89 pusat evakuasi, dan 98.846 lainnya tinggal dengan kerabat jauh.²⁰ Selama pertempuran Marawi, militer Filipina membunuh dan menangkap sekitar 986 teroris.²¹

Menghadapi ancaman terorisme kawasan, menjadi tugas ASEAN sebagai aktor regional untuk mengatasi permasalahan tersebut demi mempertahankan stabilitas keamanan kawasan. Komunitas Keamanan Politik ASEAN (APSC) merupakan salah satu pilar dari Komunitas ASEAN (*ASEAN Community*) yang dibentuk melalui deklarasi Bali Concord II pada tahun 2003 bersama dua pilar lainnya yakni Komunitas Ekonomi ASEAN (AEC) dan Komunitas Sosial Budaya ASEAN (ASCC).

Semula pada saat pertama kali dibentuk pada tahun 2003, Komunitas keamanan regional ASEAN bernama ASC (*ASEAN Security Community*). Pada

¹⁸ Eijas Arifin, "Battle of Marawi: Three Months On", The Asean Post, 2018, diakses dari <https://theaseanpost.com/article/battle-marawi-three-months> (pada 22 Mei 2022).

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Ryamizard Ryacudu, "The need for joint counter-terrorism framework in Southeast Asia", todayonline.com, 2018, diakses dari <https://www.todayonline.com/commentary/need-joint-counter-terrorism-frameworks-south-east-asia> (pada 22 Mei 2022).

²¹ *Ibid.*

tahun 2009, ASC berganti nama menjadi APSC (*ASEAN Political Security Community*).²² Konsep Cetak Biru APSC disahkan pada KTT ASEAN ke-14 di Thailand tahun 2009 yang tertuang dalam Deklarasi Cha-am, Hua Hin, tentang Peta Jalan Komunitas ASEAN (*Cha-am, Hua Hin Declaration on the Roadmap for the ASEAN Community*).²³

Lalu Peta Jalan Komunitas ASEAN 2009-2015 berakhir pada 31 Desember 2015 dalam Deklarasi Kuala Lumpur tentang ASEAN 2025: *Forging Ahead Together*, maka Cetak Biru ASEAN Community 2025 resmi diratifikasi.²⁴ Cetak Biru APSC 2025 mulai diadopsi pada tahun 2016 bersama dengan Cetak Biru AEC, ASCC, Visi Komunitas ASEAN 2025 dan Cetak Biru Deklarasi Kuala Lumpur Tentang ASEAN 2025.

Komunitas ASEAN 2025 (*ASEAN Community 2025*) memiliki tujuan untuk memetakan arah strategis ASEAN secara luas dalam dekade 2016-2025 guna mengkonsolidasikan pembangunan komunitas ASEAN dan memperdalam proses integrasi.²⁵ Cetak Biru APSC menjadi pedoman bagi ASEAN sebagai komunitas berbasis aturan dengan nilai dan norma bersama; kawasan yang kohesif, damai, stabil dan tangguh dengan tanggung jawab bersama; serta kawasan yang dinamis

²² ASEAN Secretariat, "ASEAN Political Security Community", diakses dari <https://asean.org/our-communities/asean-political-security-community/#:~:text=The%20APSC%20Blueprint%20envisages%20ASEAN,increasingly%20integrated%20and%20interdependent%20world> (pada 7 Juni 2022)

²³ Kemlu RI, "*Komunitas ASEAN*". kemlu.go.id, 2018, diakses dari https://kemlu.go.id/ptri-asean/id/pages/komunitas_asean/965/etc-menu (pada 22 Maret 2022).

²⁴ CONSULATE GENERAL OF MALAYSIA – DUBAI, "FAQs ON ASEAN 2025: FORGING AHEAD TOGETHER – ARCHIVE – PORTAL", 2015, diakses dari <https://www.kln.gov.my> > ... FAQs ON ASEAN 2025 : FORGING AHEAD TOGETHER - Archive – Portal (pada 15 April 2022).

²⁵ CONSULATE GENERAL OF MALAYSIA – DUBAI, op. cit.

dan berwawasan ke luar dalam dunia yang semakin terintegrasi dan saling bergantung.²⁶

Melanjutkan Cetak Biru APSC 2015, APSC 2025 dibuat untuk lebih relevan dan responsif terhadap tantangan perkembangan zaman dengan lebih menguatkan kapasitas, efektivitas dan efisiensi kelembagaan ASEAN.²⁷ Dokumen ASEAN Annual Report 2014-2015 menjadi dokumen evaluasi terakhir pada Cetak Biru APSC 2015 sekaligus menjadi bahan untuk menetapkan visi Komunitas ASEAN 2025. Komunitas ASEAN 2025 harus memiliki prioritas utama isu-isu kawasan yang harus diselesaikan agar penetapan peta rencana kerja ASEAN bisa lebih fokus.

Dalam pertemuan para pemimpin ASEAN yang membahas persiapan Komunitas ASEAN 2025, mereka sepakat untuk memprioritaskan dan menggarisbawahi kebutuhan untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan ASEAN dalam menangani ancaman non-tradisional dengan banyaknya ancaman kejahatan transnasional yang terjadi.²⁸ Disebutkan banyak ancaman kejahatan transnasional yang harus lebih diperhatikan melingkupi 8 area antara lain terorisme, perdagangan manusia, perdagangan obat-obatan terlarang, penyelundupan senjata, pembajakan laut, pencucian uang, kejahatan ekonomi internasional dan kejahatan siber.²⁹ Untuk

²⁶ ASEAN Secretariat, "ASEAN Political Security Community", op. cit., hlm. 2.

²⁷ ASEAN, "ACSS Strategic Plan 2016-2025", aseanstats.org, Maret 2015, diakses dari https://www.aseanstats.org/wp-content/uploads/2018/01/ACSS_Strategic_Plan_2016-2025.pdf (pada 8 Juni 2022)

²⁸ Relief Web, "Resume Annual Report 2014-2015", 17 Agustus 2015, diakses dari <https://reliefweb.int/report/world/annual-report-2014-2015> (pada 14 Juni 2022)

²⁹ ASEAN, "ASEAN Annual Report 2014-2015", 31 Juli 2015, diakses pada <http://www.asean.org/> (pada 14 Juni 2022)

isu terorisme, upaya kontra terorisme pada Cetak Biru APSC 2025 disusun dengan rencana kerja yang lebih komprehensif.³⁰

Jeda atau kebaruan dalam penelitian ini merujuk pada Pertempuran Marawi yang termasuk isu terorisme. Terorisme menjadi isu global yang relatif baru dalam perpolitikan internasional karena muncul pada abad 21 setelah digaungkannya *Global War on Terror*.³¹ Pada konteks historis yang panjang, aksi teror 9/11 mendapat respon yang besar dari ASEAN dengan deklarasi melawan kejahatan transnasional dan terorisme.³² Meski begitu, kejadian terorsime besar seperti Bom Bali I pada tahun 2002 tetap terjadi pasca sebulan sejak deklarasi tersebut. Sejak saat itu, terorisme menjadi daftar kejahatan teratas yang harus diwaspadai bagi keamanan maritim ASEAN.³³

Beberapa pengamat Asia Tenggara melihat bahwa respon ASEAN terhadap projek global AS ini merupakan yang paling responsif sehingga disebut sebagai front kedua untuk aksi melawan terorisme global.³⁴ Dari peristiwa Bom Bali I (2002) tersebut, kemudian pada tahun berikut-berikutnya, banyak lembaga keamanan di bawah ASEAN lahir untuk menangani terorisme dan memperluas cakupan penanganan ke jenis ancaman keamanan non-tradisional lainnya.³⁵ Dari sini, isu terorisme cukup mempengaruhi pertumbuhan kelembagaan ASEAN.

³⁰ ASEAN Secretariat, "ASEAN Political Security Community", op. cit., hlm. 17.

³¹ Pablo Pareja Alcaraz, loc.cit.

³² Aniek Periani & Dewa Gede Sudika Mangku, "IMPLEMENTATION OF ASEAN CONVENTION ON COUNTER TERRORISM IN ERADICATION OF TERRORISM THAT HAPPENS IN THE SOUTH ASIA AREA", 2018, International Journal of Business, Economics and Law, Vol. 17, Issue 4 (December) ISSN 2289-1552.

³³ *Ibid.*

³⁴ *Ibid.*

³⁵ *Ibid.*

Ancaman terorisme terus disorot karena mayoritas penduduk ASEAN adalah muslim serta tingkat keberagaman agama dan etnis di ASEAN cukup tinggi. Sehingga terorisme dianggap sebagai ancaman utama melihat penetrasi ideologinya.³⁶ Selain itu, jaringan-jaringan teroris domestik yang berafiliasi dengan ISIS dan Al-Qaeda terus beroperasi dan bergerak masif dengan modus operandi yang semakin kreatif dan propaganda yang menarik banyak kawula muda, sehingga aksi untuk melawan terorisme juga harus selalui diperbarui.³⁷

Bertepatan dengan dimulainya periode aktif APSC 2025, pada tahun 2016 serangan penculikan untuk meminta tebusan (*kidnap for ransom*) di Filipina meningkat sekitar 70% dari tahun 2015 ke 2016 dimana korban tidak hanya mencakup penduduk setempat tetapi juga mencakup warga asing (127 korban pada tahun 2015 menjadi 218 pada tahun 2016).³⁸

Jumlah serangan teror melalui penculikan semakin meningkat drastis pada tahun 2017 menjadi 408 korban, dimana jumlah tersebut mengejutkan karena hampir dua kali lipat jumlah penculikan di tahun sebelumnya.³⁹ Diikuti serangan besar di kota Marawi, tragedi serangan teror terbesar yang pernah terjadi di Asia Tenggara tersebut tidak hanya menyebarkan rasa takut selama bebulan-bulan melalui taktik sandera, gerilya dan serangan secara langsung, tetapi juga memakan

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ United Nations Office on Drugs and Crime, "Kidnapping for Ransom and Terrorism", 2019, diakses dari <https://www.unodc.org/e4j/en/organized-crime/module-16/key-issues/kidnapping-for-ransom-and-terrorism.html> (pada 8 Juni 2022)

³⁹ *Ibid.*

banyak korban jiwa, meluluhlantakkan kota dan bangunan-bangunan penting pemerintahan.⁴⁰

Dengan kelembagaan yang diperkuat pada Cetak Biru APSC yang baru (APSC 2025) sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN disertai peristiwa serangan terorisme besar di awal pelaksanaannya, maka penting untuk menyorot implementasi APSC 2025 dalam merespon isu tersebut. Sehingga tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkembangan komunitas keamanan ASEAN dilihat dari analisis studi kasus respon negara-negara ASEAN di bawah Cetak Biru APSC 2025 terhadap Pertempuran Marawi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik dalam penelitian ini adalah: **“Bagaimana respon negara-negara ASEAN di bawah Cetak Biru APSC 2025 terhadap pertempuran Marawi dari sudut pandang pendekatan perkembangan komunitas keamanan (studi kasus tahun 2016-2021)?”**

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Secara Umum

Secara umum, penelitian ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan pendidikan Sarjana Strata 1 (S1) Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas

⁴⁰ Amnesty International, “Philippines: “Battle of Marawi leaves trail of death and destruction”, 2017, diakses dari <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/11/philippines-battle-of-marawi-leaves-trail-of-death-and-destruction/> (pada 18 Juni 2022)

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.

1.3.1 Secara Khusus

Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana perkembangan komunitas keamanan ASEAN melalui respon APSC sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN (APSC 2025) terhadap pertempuran Marawi yang merupakan serangan terorisme terbesar di kawasan Asia Tenggara. Pertempuran Marawi sendiri terjadi di tahun 2017 yang diawali dengan peristiwa penculikan untuk tebusan secara masif yang dimulai tahun 2016 dimana di tahun yang sama Cetak Biru APSC 2025 mulai diberlakukan.

1.4 Kerangka Pemikiran

1.4.1 Landasan Konseptual

1.4.1.1 Komunitas Keamanan

1.4.1.1.1 Definisi Komunitas Keamanan

Komunitas keamanan dicirikan dengan kepastian bahwa anggota yang tergabung di dalamnya tidak akan berselisih secara fisik dan mengupayakan cara lain untuk menyelesaikan masalah.⁴¹ Kerangka konseptual mengenai komunitas keamanan yang dipelopori pertama kali oleh Karl W. Deutsch dibentuk berdasarkan pemikiran bagaimana negara memelihara hubungan baik jangka panjang dengan

⁴¹ Karl W. Deutsch, ‘Security Communities’, dalam James Rosenau (ed.), *International Politics and Foreign Policy* (New York: Free Press, 1961).

negara lain melalui kebiasaan mengelola penyelesaian masalah secara damai (tanpa ada persiapan terorganisir untuk serangan *vis-à-vis*).⁴²

Dalam membangun kerangka konseptual, terdapat kontribusi kaum konstruktivis termasuk Deutschian mengenai karakteristik komunitas keamanan yakni adanya institusi, norma dan identitas.⁴³ Karena pembangunan teori berkisar pasca Perang Dunia, konsep komunitas keamanan oleh Deutsch ini berfokus pada penyebaran nilai-nilai transnasional, pemahaman bersama, rasa saling ketergantungan yang lebih besar, termasuk upaya penemuan kepentingan bersama dan identitas kolektif yang progresif hingga sampai pada titik menjadikan perang tidak sah sebagai sarana menyelesaikan masalah.⁴⁴

Lalu mengenai klasifikasi komunitas keamanan, Deutsch membaginya menjadi dua jenis yakni komunitas keamanan campuran (*amalgamated*) dan pluralistik (*pluralistic*). Komunitas keamanan campuran dibuat ketika dua atau lebih negara merdeka membentuk satu pemerintahan rezim yang sama. Contoh klasiknya yakni penyatuan tiga belas koloni di daratan Amerika yang membentuk Amerika Serikat dengan menggabungkan kekuatan untuk membentuk pemerintahan federal. Jenis komunitas ini dapat terjadi sebagai akibat dari imperialisme ketika negara kuat melakukan ekspansionisme dan menyerap negara yang lebih lemah.⁴⁵

⁴² Amitav Acharya, 'Constructing A Security Community in Southeast Asia: ASEAN and the Problem of Regional Order (2nd Edition)', (London & New York: Routledge, 2009).

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 18.

⁴⁵ Agustin Julio Bulling, 'THE ASEAN COMMUNITY AND THE CONCEPT', *Intus-Legere Historia*, 10(1), 2016, doi: 10.15691/07176864.2016.004.

Sedangkan ciri komunitas keamanan pluralistik yaitu wilayah transnasional yang mana negara anggotanya mempertahankan independensi hukum pemerintahan yang terpisah. Negara-negara di dalamnya umumnya cocok satu sama lain dalam nilai-nilai mereka, mengemban tanggung jawab, loyalitas, identitas dan ‘harapan yang dapat diandalkan akan perubahan damai’. Harapan yang dapat diandalkan akan perubahan damai diartikan Deutsch sebagai penyelesaian masalah sosial melalui prosedur kelembagaan tanpa penggunaan kekuatan fisik skala besar.⁴⁶

Oleh Amitav Acharya, komunitas keamanan secara spesifik memuat beberapa karakteristik, diantaranya norma yang ketat tentang pelarangan penggunaan kekuatan atau kekerasan; tidak ada akuisisi senjata dan perencanaan kontijensi yang bersifat kompetitif; kelembagaan dan proses (baik formal maupun informal) dalam menyelesaikan masalah secara pasif; prospek jangka panjang untuk menghindari perang; kerja sama dan integrasi fungsional yang signifikan; serta upaya untuk membangun identitas kolektif.⁴⁷

1.4.1.1.2 Perkembangan Komunitas Keamanan

Alih-alih dianggap sebagai sesuatu yang statis, komunitas keamanan merupakan sebuah proses sosialisasi yang panjang dan berkelanjutan mempertimbangkan tujuannya untuk mencapai ‘harapan yang dapat diandalkan untuk perubahan damai’. Oleh karena itu, dalam melihat interaksi dan integrasi negara anggota di dalamnya, terdapat beberapa tahapan perkembangan komunitas

⁴⁶ *Ibid.*

⁴⁷ *Ibid.*

keamanan. Adler dan Barnett adalah *scholar* yang membuat sketsa pendekatan konstruktivis sosial mengenai perkembangan komunitas keamanan yang terdiri dari tiga tahapan dengan karakteristiknya masing-masing.⁴⁸

1.4.1.1.2.1 Komunitas Keamanan Baru

Tiga identifikasi tahapan perkembangan komunitas keamanan tersebut antara lain fase awal/baru lahir (*nascent*), fase naik (*ascendant*) dan fase dewasa (*mature*).⁴⁹ Pada fase komunitas keamanan yang baru lahir, negara anggota mengkoordinasikan hubungan mereka demi terciptanya hubungan yang bersifat timbal balik. Upaya untuk mempererat hubungan tersebut juga dapat didorong melalui pertukaran intraregional baik secara bilateral maupun multilateral.⁵⁰

Aktor-aktor dapat mengandalkan lembaga umum untuk mempromosikan kerja sama untuk memperdalam interaksi mereka dan memverifikasi kepatuhan mereka. Negara anggota dapat menurunkan hambatan pertukaran tersebut dan menemukan suatu kepentingan yang sama, yang mungkin juga sesuatu tersebut secara tidak langsung dapat memicu persatuan anggota seperti kondisi di bawah persepsi ancaman yang sama. Sehingga identitas bersama terbentuk untuk membangun komunitas, dan juga melalui persaingan organisasi (berkaca pada pengalaman organisasi multilateral lainnya).⁵¹

1.4.1.1.2.2 Komunitas Keamanan Fase Naik

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*

Fase naik (*ascendant*) ditandai dengan pertumbuhan jaringan kerja yang kompleks, Kelembagaan didalamnya mencerminkan koordinasi dan kerja sama militer yang lebih erat (seperti latihan militer gabungan), berkurangnya ketakutan di salah satu pihak bahwa pihak lainnya dalam kelompok tersebut merupakan ancaman, dan memperdalam rasa saling percaya (*mutual trust*) dengan transisi kognitif awal menuju proses intersubjektif dan identitas kolektif 'yang mulai mendorong harapan yang dapat diandalkan akan perubahan damai'.⁵²

1.4.1.1.2.3 Komunitas Keamanan Dewasa

Yang ketiga, sebuah komunitas keamanan dikatakan sudah di tahap fase dewasa (*mature*) ketika memiliki karakteristik kelembagaan yang lebih besar, supranasionalisme, tingkat kepercayaan yang tinggi akan ketiadaan kemungkinan konflik militer atau secara percaya diri meyakini ketiadaan penggunaan kekerasan. Fase dewasa (*mature*) dari komunitas keamanan pluralistik, oleh Adler dan Barnett disubklasifikasikan lagi menjadi komunitas keamanan yang terikat erat (*tightly coupled security community*) dan komunitas keamanan longgar (*loosely coupled security community*).⁵³

Komunitas keamanan yang digabungkan secara longgar bersifat minimalis. Karakteristiknya terbatas pada 'wilayah transnasional yang terdiri dari negara-negara berdaulat dimana rakyatnya mempertahankan harapan yang dapat diandalkan akan perubahan damai'. Negara anggotanya mengharapkan tidak ada ancaman militer dari satu sama lain dan mempertimbangkan pengendalian diri.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*, hlm. 37.

Menurut Adler dan Barnett, negara-negara dalam komunitas telah merencanakan penguatan dan kerja militer bersama. Yang tampak dewasa dalam ciri komunitas keamanan longgar ini, negara-negara anggota memiliki persepsi yang sama terhadap ancaman kawasan, serta memiliki wacana yang sama dalam cara mereka mendefinisikan komunitas keamanan.⁵⁴

Sedangkan komunitas keamanan dewasa yang terikat erat mencakup semua ciri komunitas keamanan longgar dengan penambahan beberapa poin yang lebih terintegrasi. Selain itu, terdapat standar yang lebih erat seperti masyarakat gotong royong (*mutual aid society*) yang menyediakan upaya kolektif dan kooperatif untuk membantu satu sama lain, serta menawarkan solusi gabungan untuk permasalahan bersama. Misalnya bantuan kemanusiaan yang terkoordinasi pasca bencana atau bagaimana sebuah komunitas membangun skema tindakan pasca konflik. Mereka juga harus memiliki beberapa karakteristik supranasionalisme, atau 'sistem pasca-kedaulatan', dan bentuk keamanan komprehensif. Selain itu, komunitas yang terikat erat membutuhkan 'sistem aturan yang terletak di antara negara berdaulat dan pemerintahan regional yang terpusat'.⁵⁵

Komunitas keamanan yang terikat erat mengkoordinasikan kebijakan bersama melawan ancaman internal sebagai indikator perpanjangan dari persepsi yang sama terhadap ancaman dalam spektrum komunitas keamanan longgar. Oleh karenanya hal tersebut membutuhkan integrasi kerja sama militer yang tinggi dalam kawasan. Indikator yang memungkinkan kita untuk dapat membedakan komunitas

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

keamanan yang longgar dan yang terikat erat adalah kebijakan koordinatif untuk melawan ancaman internal, integrasi militer tingkat tinggi dan internasionalisasi kewenangan (sistem pasca-kedaulatan).⁵⁶

Komunitas keamanan pluralistik perlu menggunakan lensa sosiologis tentang bagaimana negara mewujudkan kepentingan nasional mereka melalui pemaksimalan utilitas fungsional seperti menciptakan mekanisme arbitrase lembaga regional untuk pengembangan kepercayaan (*mutual trust*), terutama melalui norma perilaku; pengembangan 'budaya kawasan' yang dibangun berdasarkan nilai-nilai bersama seperti demokrasi, developmentalisme dan hak asasi manusia; dan pengembangan pembelajaran sosial, seperti 'redefinisi' dan 'reinterpretasi' realitas, pertukaran pemahaman diri, dan harapan normatif.⁵⁷

Namun, perbedaan antara komunitas keamanan 'longgar' dan 'terikat erat' memungkinkan untuk tidak menunjukkan perbedaan yang tajam, dan mungkin ada beberapa tumpang tindih antara karakteristik komunitas keamanan di tahap baru lahir, naik, dan dewasa. Misalnya, di tahap dewasa mungkin juga karakteristik komunitas keamanan yang longgar dan terikat erat berpotensi tumpang tindih jika diaplikasikan untuk menganalisis komunitas keamanan yang secara nyata sudah terbentuk. Misalnya sebuah komunitas keamanan mungkin sudah memasuki fase dewasa ketika level integrasi kerja sama militernya sudah tinggi.⁵⁸ Namun ketiadaan supranasionalisme bisa menjadi penanda bahwa komunitas tersebut belum dapat dikatakan dewasa sepenuhnya. Hal tersebut juga tergantung pada

⁵⁶ Agustin Julio Bulling., op.cit., hlm. 90

⁵⁷ Amitav Acharya., op.cit., hlm. 25

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 37

kedalaman kepercayaan mereka, sifat dan tingkat pelebagaan sistem pemerintahan mereka, dan apakah mereka berada dalam anarki formal atau berada di ambang perencanaan untuk mengubahnya.⁵⁹

Ide mengenai komunitas keamanan dianggap sebagai sebuah proses daripada kondisi terminal.⁶⁰ Oleh pencetus perkembangan komunitas keamanan yakni Adler dan Barnett, kerangka konseptual tersebut dimungkinkan memiliki kekurangan atau dapat terganggu.⁶¹ Namun menurut Acharya, tidak banyak yang ditunjukkan dari tinjauan pustaka pada kondisi apa komunitas keamanan dapat terganggu.⁶² Berkaitan dengan potensi tumpang tindihnya analisis fase perkembangan komunitas keamanan, identifikasi karakteristik dari setiap fase perkembangan perlu melihat ke belakang untuk memastikan apakah semua karakteristik di fase sebelumnya terpenuhi semua.⁶³ Untuk fase baru, kepentingan yang sama dapat mendorong hubungan timbal balik. Hubungan timbal balik yang sudah terbangun kemudian menumbuhkan *mutual trust* (karakteristik fase naik).⁶⁴ *Mutual trust* tersebut menjadi basis kerja sama yang lebih terintegrasi dan terkoordinasi dalam melawan ancaman internal (pada fase dewasa).⁶⁵ Oleh karena itu dapat dipahami bahwa terdapat karakteristik yang hampir serupa dari fase sebelumnya ke fase selanjutnya.

⁵⁹ *Ibid.*, hlm. 38

⁶⁰ *Ibid.*

⁶¹ *Ibid.*

⁶² *Ibid.*

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*, hlm. 36

⁶⁵ *Ibid.*

Untuk mempermudah memahami sejauh mana komunitas keamanan telah berkembang, berikut merupakan tabel karakteristik pada setiap fase perkembangan komunitas keamanan.

Tabel 1.1 Fase Perkembangan Komunitas Keamanan dan Karakteristiknya

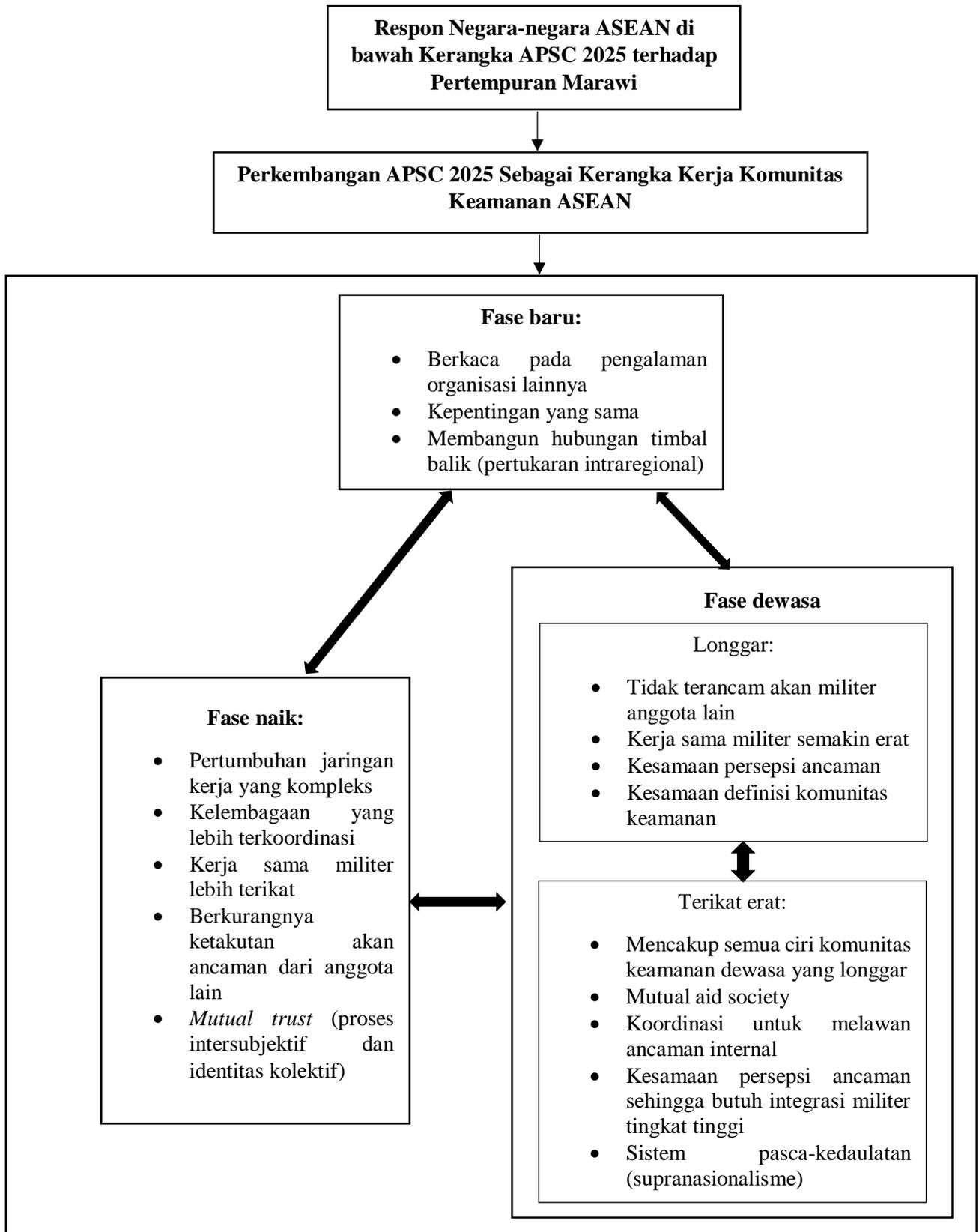
| Fase | | Karakteristik |
|-------------|---------|--|
| Fase baru | | <ul style="list-style-type: none"> • Berkaca pada pengalaman organisasi lainnya • Kepentingan yang sama • Membangun hubungan timbal balik (pertukaran intraregional) |
| Fase naik | | <ul style="list-style-type: none"> • Mutual trust (proses intersubjektif dan identitas kolektif) • Pertumbuhan jaringan kerja yang kompleks • Kelembagaan yang lebih terkoordinasi • Berkurangnya ketakutan akan ancaman dari anggota lain • Kerja sama militer lebih terikat |
| Fase dewasa | Longgar | <ul style="list-style-type: none"> • Kerja sama militer semakin erat • Tidak terancam akan militer anggota lain • Kesamaan definisi komunitas keamanan • Kesamaan persepsi ancaman |
| | Erat | <ul style="list-style-type: none"> • Kesamaan persepsi ancaman sehingga butuh integrasi militer tingkat tinggi • Koordinasi untuk melawan ancaman internal • Mencakup semua ciri komunitas keamanan dewasa yang longgar • Mutual aid society • Sistem pasca-kedaulatan (supranasionalisme) |

Sumber: (Acharya, 2009)⁶⁶

⁶⁶ *Ibid.*

1.5 Sintesa Pemikiran

Bagan 1.1 Sintesa Pemikiran



Berdasarkan uraian latar belakang hingga kerangka pemikiran yang telah dijelaskan sebelumnya, maka terbentuklah sintesa pemikiran di atas. Dalam menjawab rumusan masalah “Bagaimana perkembangan komunitas keamanan ASEAN dalam studi kasus respon negara-negara ASEAN di bawah APSC 2025 terhadap pertempuran Marawi (tahun 2016-2021)”, penulis menggunakan konsep perkembangan komunitas keamanan. Terbentuknya APSC hingga rekam jejak implementasi APSC dalam menangani ancaman keamanan politik ASEAN, yang salah satunya adalah isu terorisme utamanya peristiwa Pertempuran Marawi dalam penelitian ini akan dijabarkan melalui tiga fase perkembangan komunitas keamanan antara lain fase baru, fase naik dan fase dewasa.

Tujuan akhir dari analisis dalam penelitian ini secara eksplisit akan merujuk pada maksud ‘sampai dimana fase perkembangan APSC sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN dalam merespon Pertempuran Marawi yang menjadi salah satu peristiwa terorisme terbesar di ASEAN’. Dalam kerangka berpikir telah dijelaskan bahwa analisis perkembangan komunitas keamanan mungkin akan terlihat tumpang tindih yang bahkan diasumsikan oleh Acharya (2009) antara komunitas keamanan dewasa yang longgar dan terikat erat tidak memiliki perbedaan yang tajam. Maksudnya, dalam proses perkembangannya hingga mencapai fase dewasa, komunitas tersebut mungkin masih belum dikatakan dewasa sepenuhnya ketika mungkin ada satu indikator dari fase naik belum terpenuhi meskipun sebagian indikator fase dewasa telah terpenuhi.

Karena dianggap sebagai proses yang terus berjalan alih-alih statis, maka dalam penggambaran bagan sintesa pemikiran, penulis tidak hanya

menggambarkan proses perkembangan satu arah dari fase baru ke naik lalu berakhir di fase dewasa, tetapi juga menggambarkannya dengan panah dua arah. Artinya, meskipun hubungan anggotanya sudah meningkat, tetap ada kemungkinan bahwa di fase sebelumnya terdapat satu atau beberapa indikator belum terpenuhi.

1.6 Argumen Utama

Berdasarkan uraian latar belakang, kerangka berpikir hingga sintesa pemikiran, maka penulis akan memberikan argumen utama dalam penelitian ini. APSC sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN tentu dalam perjalanan implementasinya telah merepresentasikan perkembangan komunitas keamanan ASEAN. Di fase baru komunitas keamanan ASEAN, hal ini terwujud dari berdirinya ASC pada Deklarasi Bali Concord II tahun 2003, dimana negara-negara ASEAN memiliki kepentingan yang sama yaitu membentuk suatu kerangka kerja komunitas di bidang keamanan untuk menangani ancaman regional baik ancaman tradisional maupun non-tradisional. Salah satu ancaman non-tradisional yang mengancam kawasan ASEAN adalah terorisme yang mana menurut GTD, data aksi teror di ASEAN terus meningkat setelah peristiwa 9/11. Argumen di atas mencirikan awal mula komunitas keamanan baru terbentuk, yakni adanya dorongan kepentingan yang sama

Setelah periode implementasi APSC 2015 (2009-2015) berakhir pada tahun 2015, APSC memasuki periode baru APSC 2025 (2016-2025). Menilik perkembangan APSC memasuki dekade kedua, tidak bisa kita katakan bahwa komunitas keamanan ASEAN merupakan komunitas keamanan baru. Dengan perbedaan isi cetak biru dimana APSC 2025 memuat koordinasi kerja antar

lembaga di bawah ASEAN yang lebih terikat dan upaya kontra terorisme yang lebih kompleks di banding Cetak Biru APSC 2015, maka komunitas keamanan ASEAN telah memasuki fase naik.

Kemudian dalam menangani ancaman internal, terdapat beberapa kesepakatan kerja sama antara negara-negara ASEAN yang diformalkan melalui dokumen-dokumen di bawah Cetak Biru APSC 2025 seperti perubahan pada pasal 9.8 Konvensi ASEAN Tentang Kontraterorisme (ACCT) mengenai perubahan program latihan dan simulasi taktis bersama keamanan pada batas-batas antar negara. Contoh yang sudah diterapkan adalah kerja sama patroli gabungan seperti *Trilateral Cooperative Arrangement* (TCA) antara Indonesia, Malaysia dan Filipina.

Dari sini dapat dipahami bahwa karakteristik fase dewasa sudah terlihat dari koordinasi melawan ancaman internal dan kerja sama militer yang lebih terikat. Tetapi tidak semua negara ASEAN terlibat di dalamnya karena perbedaan persepsi ancaman dan kapabilitas militer antar negara satu dengan lainnya dalam kawasan. Oleh karena itu akan terlihat bahwa indikator di fase naik berupa *mutual trust* dan integrasi militer tingkat tinggi serta keberadaan supranasionalisme pada fase dewasa belum terpenuhi. Perkembangan komunitas keamanan merupakan proses yang dinamis, maka belum bisa kita katakan bahwa komunitas tersebut dewasa sepenuhnya jika ada indikator pada fase dewasa dan bahkan mungkin pada fase naik belum terpenuhi.

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Tipe Penelitian

Metodologi penelitian adalah teknik atau cara-cara yang digunakan peneliti untuk mencapai tujuan penelitian.⁶⁷ Selain itu, metodologi memberikan rancangan penelitian yang memudahkan peneliti untuk menjawab rumusan masalah penelitian.⁶⁸ Tipe penulisan dalam penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah tipe penelitian yang digunakan untuk menggambarkan status kelompok manusia, subjek, serangkaian kondisi, sistem pemikiran dan kelas peristiwa di masa sekarang.⁶⁹ Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk menggambarkan secara sistematis fenomena yang diselidiki berdasarkan karakteristik tertentu.⁷⁰

Pemilihan metode deskriptif dalam penelitian ini didasarkan oleh tujuan penelitian yang ingin mengetahui bagaimana perkembangan komunitas keamanan ASEAN yang dilihat dari respon APSC sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN terhadap Pertempuran Marawi dengan berpedoman pada Cetak Biru APSC 2025 (periode aktif 2016-2025). Terdapat beberapa karakteristik pada setiap tahapan perkembangan komunitas keamanan. Oleh karena itu, peneliti ingin mendeskripsikan hasil analisis perkembangan komunitas keamanan ASEAN melalui karakteristik dalam setiap tahapan tersebut.

1.7.2 Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian agar berfokus pada analisis, maka penulis menetapkan batasan waktu. Rentang waktu dalam penelitian ini adalah tahun 2016

⁶⁷ M. Nazir, "Metode Penelitian", (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011).

⁶⁸ *Ibid.*

⁶⁹ *Ibid.*

⁷⁰ *Ibid.*

hingga 2021. Tahun 2016 adalah waktu dimulainya periode implementasi Cetak Biru APSC 2025 sekaligus menjadi tahun masifnya aksi teror melalui penculikan untuk meminta tebusan di area tri-border Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia dan Filipina) yang kemudian aksi teror memuncak di tahun 2017 di Kota Marawi, Filipina. Selain itu tahun 2016 menjadi tahun awal-awal ketika angka terorisme melonjak drastis hingga tahun 2019 menurut *Global Data Terrorism (GTD)*. Data mengenai respon negara-negara ASEAN terhadap Pertempuran Marawi juga ditemukan di tahun 2018. Sedangkan batas akhir jangkauan penelitian adalah tahun 2021 dimana isu terorisme menjadi perhatian utama dari tiga isu utama keamanan politik ASEAN selain COVID-19 dan kerja sama hukum ekstradisi ASEAN. Di samping itu, tahun 2021 menjadi batas akhir tahun yang dapat diteliti oleh penulis secara penuh karena berlangsungnya waktu penelitian oleh penulis yaitu di pertengahan tahun 2022.

1.7.3 Teknik Pengumpulan Data

Karena data dalam penelitian didominasi oleh deskripsi, narasi dan kata-kata, maka data dalam penelitian ini termasuk data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berupa deskripsi, narasi dan kata-kata, bukan data numerik ataupun data yang diformalkan melalui angka-angka.⁷¹ Terdapat pula data numerik pada grafik atau statistik dalam penelitian ini, namun data tersebut bukan hasil perhitungan murni penulis menggunakan model matematika, melainkan data statistik yang sudah tersedia pada dokumen laporan resmi ASEAN yang penulis kutip sehingga

⁷¹ Christopher Lamont, "Research Methods in International Relations". (SAGE Publications Ltd, 2015).

dapat disebut statistik deskriptif. Menurut Nicholson dalam buku “Metode Riset dalam Hubungan Internasional” karya Lamont, data kuantitatif lebih dari sekedar statistik deskriptif.⁷² Sehingga data numerik yang ada pada penelitian ini masih dalam kategori data kualitatif.

Pengumpulan data kualitatif menggunakan beberapa metode seperti penelitian berbasis dokumen dan arsip, laporan media, wawancara dan penelitian berbasis internet. Penelitian berbasis dokumen dan arsip adalah strategi pengumpulan data yang paling sering digunakan oleh mahasiswa yang meneliti di bidang Hubungan Internasional (HI) seperti kajian konflik internasional, Organisasi Internasional, lingkungan politik atau Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengharuskan kita pada tingkat tertentu untuk terlibat dengan dokumen.⁷³ Dokumen tersebut kemudian dibedakan menjadi dua sumber yang berbeda, yakni sumber dokumen primer dan sumber sekunder. Sumber primer menggambarkan secara langsung peristiwa utama dan pertanyaan seputar siapa yang mendokumentasikan sumber utama tersebut.⁷⁴

Sumber primer ini seringkali mengandalkan dokumen resmi dan penelitian arsip yang dirilis secara publik oleh negara, organisasi atau bisnis.⁷⁵ Dokumen tersebut antara lain perjanjian, pernyataan kebijakan, transkrip wawancara atau pidato, catatan memo, email resmi, anggaran kepegawaian, undang-undang, file personel maupun sebuah laporan kerja dan laporan mediasi perjanjian.⁷⁶ Sedangkan

⁷² *Ibid.*, hlm. 107

⁷³ *Ibid.*, hlm. 86

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ *Ibid.*

⁷⁶ *Ibid.*

sumber sekunder adalah sumber penelitian yang menganalisis dan merujuk pada sumber utama.⁷⁷

Selain penelitian berbasis dokumen dan arsip, laporan media dapat menjadi teknik pengumpulan sekunder yang berharga. Faktanya, kita sering mengandalkan sumber media untuk mengingatkan kita pada topik tertentu yang menarik atau informasi yang memberi kita latar belakang topik penelitian.⁷⁸ Lalu teknik pengumpulan data lainnya yang cukup mudah dilakukan adalah penelitian berbasis internet untuk mengakses materi ilmiah seperti *e-book*, jurnal ilmiah, *website* media lokal, nasional, internasional, *website* pemerintah negara dan organisasi internasional. Bahkan akses untuk mendapat dokumen, arsip atau laporan media pada era sekarang, sumber paling mudah adalah melalui internet.

Keterbatasan pada teknik pengumpulan data berbasis dokumen, arsip dan laporan media (atau secara luas pada kelompok teknik pengumpulan data kualitatif) yaitu sangat jaranganya seorang peneliti memiliki akses penuh terhadap arsip suatu organisasi maupun negara.⁷⁹ Jika peneliti mendapat akses secara lengkap pun, peneliti hanya akan mendapat gambaran sekilas tentang item-item interaksi sosial institusi atau organisasi yang direkam dalam dokumen arsip namun tetap memungkinkan terdapat hal-hal yang terlewat atau tidak terlihat oleh peneliti dalam proses peninjauan yang menyeluruh.⁸⁰

Dalam mengutip sumber media, penting untuk membedakan media internasional seperti jaringan global utama contohnya CNN dan BBC maupun surat

⁷⁷ *Ibid.*

⁷⁸ *Ibid.*, hlm. 88

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*

kabar seperti New York Times dan Guardian.⁸¹ Selain itu untuk hal yang perlu diperhatikan ketika mengutip media lokal yaitu apakah media tersebut dapat dikonsumsi oleh seluruh audiens nasional atau berfokus pada audiens khusus seperti seperti media lokal yang memenuhi kepentingan kelompok ideologis politik tertentu sehingga memungkinkan untuk menawarkan perspektif tertentu atau ekstrapolasi untuk menunjukkan sentimen nasional yang lebih luas.⁸² Oleh karena itu, peneliti perlu terus memepertanyakan kebenaran apa yang tertulis didalamnya dan disarankan melakukan konsultasi pada ahli atau akademisi.⁸³ Biasanya untuk mengatasi jurang keterbatasan tersebut disarankan untuk melakukan teknik pengumpulan data dengan survei wawancara dan kelompok diskusi.⁸⁴

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah penelitian berbasis dokumen dan arsip, laporan media serta penelitian berbasis internet. Dokumen-dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN seperti Cetak Biru APSC, dokumen ACCT dan ACPoA on CT (*ASEAN Comprehensive Plan of Action on Counter Terrorism*) merupakan contoh dari sumber primer berupa dokumen resmi dan arsip yang dikeluarkan oleh organisasi internasional. Selain itu terdapat pula sumber sekunder seperti laporan media dan penelitian berbasis internet berupa *e-book*, jurnal ilmiah contohnya referensi yang dirujuk penulis dalam kerangka pemikiran, dan artikel berita yang dimuat oleh website lembaga pemerintahan seperti *website* asean.org, aseanstaats.org,

⁸¹ *Ibid.*

⁸² *Ibid.*

⁸³ *Ibid.*

⁸⁴ *Ibid.*, hlm 85.

kemenlu.go.id, polkam.go.id dan *website* resmi pemerintah negara-negara anggota ASEAN lainnya.

1.7.4 Teknik Analisis Data

Setelah data kualitatif terkumpul, analisis untuk hasil wawancara, dokumen resmi, sumber web dan sumber lainnya, dapat disadari bahwa data kualitatif cocok untuk banyak interpretasi dan alat analisis yang berbeda. Tidak seperti data kuantitatif yang mengandalkan statistik dan model matematika yang memiliki bukti lebih eksplisit, data kualitatif cenderung lebih subjektif.⁸⁵ Terdapat dua teknik analisis data kualitatif yang banyak digunakan ilmuwan HI yaitu analisis wacana (*discourses analysis*) dan analisis isi (*content analysis*). Beberapa ahli berpendapat bahwa analisis isi bertindak sebagai pemecahan data tekstual ke dalam data numerik melalui metode kategorisasi dan pengkodean.⁸⁶

Namun analisis isi tidak murni kuantitatif maupun kualitatif, tetapi paling baik didefinisikan oleh Berg dan Lune dalam buku karya Lamont sebagai aktivitas peneliti dalam menyelami dan menjelaskan komunikasi sosial (kecenderungan empiris). Dengan demikian dapat mencakup data teks, film maupun seni lainnya. Untuk melakukan analisis ini, langkah pertama secara eksplisit kita harus menentukan ruang lingkup analisis.⁸⁷ Langkah selanjutnya adalah memilih referensi terkait atau *framing* berita, dimana nantinya dapat merujuk ke sumber terdekat dengan topik penelitian kita.⁸⁸ Dari sana analisis tekstual dapat dilakukan.

⁸⁵ *Ibid.*, hlm. 96.

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 97.

⁸⁷ *Ibid.*

⁸⁸ *Ibid.*

Sedangkan analisis wacana digunakan untuk memahami bagaimana bahasa membentuk atau menghasilkan dunia sosial (interpretatif).⁸⁹

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi dimana rumusan masalah bersifat empiris dengan tujuan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan perkembangan APSC sebagai kerangka kerja komunitas keamanan ASEAN dalam merespon peristiwa Pertempuran Marawi. Di samping itu, penulis tidak berusaha untuk membongkar makna atau pesan komunikasi dibalik teks baik secara tekstual maupun kontekstual dimana penggunaan bahasa juga dipengaruhi oleh struktur sosial yang mendasarinya. Merujuk pada rumusan masalah dalam penelitian ini, contoh yang dapat digunakan jika menggunakan teknik analisis wacana adalah bagaimana analisis wacana kritis dalam pembentukan Cetak Biru APSC 2025 oleh ASEAN?

1.7.5 Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penelitian ini, penulis membaginya ke dalam empat bab dengan garis besar sebagai berikut:

BAB I:

Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka konseptual, sintesa pemikiran, argumen utama dan metodologi yang mencakup tipe penelitian, jangkauan penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan sistematika penulisan.

BAB II:

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 99.

Bab II membahas data penelitian yang didapat penulis dari laporan-laporan resmi yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN seperti Cetak Biru APSC serta berita dari media kredibel dan *website* resmi lembaga pemerintah negara maupun organisasi internasional. Dengan judul bab “Respon Negara-negara Anggota ASEAN terhadap Pertempuran Marawi di Bawah Impementasi Cetak Biru APSC 2025”, maka dalam Bab II memuat garis besar yang dibagi dalam beberapa subbab antara lain **2.1** Runtutan Peristiwa Terorisme di Asia Tenggara dan khususnya Area Tri-border Tahun 2016; **2.2** Pertempuran Marawi Tahun 2017; **2.3** Perjalanan Kelembagan ASEAN dalam Upaya Kontra Terorisme **2.4** Perbandingan Cetak Biru APSC 2015 dan APSC 2025; **2.5** Respon negara-negara anggota ASEAN terhadap Pertempuran Marawi di Bawah Kerangka Kerja APSC 2025 (termasuk implementasi kerja sama TCA antara Indonesia, Malaysia dan Filipina dan Laporan Tengah Periode Komunitas ASEAN 2017-2021).

BAB III:

Bab III membahas mengenai analisis data penelitian yang telah dibahas di bab II. Dengan judul “ Analisis Perkembangan Komunitas Keamanan ASEAN dalam Melihat Respon Negara-negara Anggota ASEAN di Bawah APSC 2025 terhadap Pertempuran Marawi, maka garis besar dalam bab III dibagi dalam beberapa subbab antara lain **3.1** Implementasi APSC 2015 dan Hasil Perbandingannya dengan Cetak Biru APSC 2025; **3.2** Persepsi Ancaman dan Kerja Sama Militer Negara Anggota ASEAN Sejak Era ASC berdiri; Analisis Peningkatan Koordinasi Kelembagaan ASEAN pada Cetak Biru APSC 2025; **3.3** Respon Bantuan Negara-negara Anggota ASEAN Terhadap Pertempuran Marawi

di Filipina; **3.4** ASEAN Way dan Prinsip Non-intervensi dalam Kelembagaan ASEAN; dan **3.5** menjelaskan kemungkinan tumpang tindihnya perkembangan komunitas keamanan ASEAN pada analisis studi kasus Pertempuran Marawi di era APSC 2025.

BAB IV:

Bab IV menjadi bab penutup yang berisi kesimpulan dari pembahasan dan analisis data yang telah diuraikan penulis di atas serta saran-saran yang dianggap perlu dalam meninjau perbaikan penelitian bagi penulis dan penelitian selanjutnya.